

RATU KALINYAMAT DALAM PERSPEKTIF FEMINISME POSTKOLONIAL: RESISTENSI ANTIKOLONIAL, KEPEMIMPINAN PEREMPUAN, DAN KEMANDIRIAN EKONOMI

Ozi Setiadi^{1*}, Umi Ni'matin Choiriyah², Yulia Friyanni³

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kudus, Indonesia

³ Universitas Islam Depok, Indonesia

E-mail: ozisetiadi@uinsuku.ac.id

***Abstract.** Ratu Kalinyamat is frequently remembered as a courageous ruler, yet the political meaning of her authority is often reduced to heroic biography. This article examines her leadership, anti-Portuguese campaigns, and maritime economy through postcolonial feminist analysis. It uses a qualitative historical-literature design. The corpus comprised academic studies and historical syntheses. It also included published reconstructions of Portuguese and local records. Sources were selected through relevance, credibility, and bibliographic traceability. They were examined through heuristics, internal and external criticism, interpretation, and historiographical synthesis. Spivak's politics of representation, Mohanty's account of transnational solidarity, and Yuval-Davis's analysis of gender and nation guide the interpretation. The study finds that Ratu Kalinyamat exercised recognized dynastic authority in a male-dominated political field. Her campaigns against Portuguese Malacca depended on regional coalitions and a substantial maritime economy. They did not end Portuguese rule in Malacca. Conflicting figures for ships and troops therefore require critical comparison. The article does not label this sixteenth-century ruler a self-identified feminist or a subaltern subject. Instead, it argues that postcolonial feminism clarifies how her authority was represented, how collective resistance was organized, and how economic capacity sustained political sovereignty.*

***Keywords:** Anti-colonial resistance, postcolonial feminism, Ratu Kalinyamat*

Abstrak. Ratu Kalinyamat kerap dikenang sebagai penguasa pemberani. Namun, makna politik kepemimpinannya sering berhenti pada biografi kepahlawanan. Artikel ini mengkaji kekuasaan politik, ekspedisi anti-Portugis, dan ekonomi maritim Ratu Kalinyamat melalui perspektif feminisme postkolonial. Penelitian menggunakan desain kualitatif historis-kepastakaan. Korpus mencakup artikel ilmiah dan sintesis sejarah. Korpus juga mencakup rekonstruksi terbitan atas catatan Portugis serta sumber lokal. Sumber dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterlacakan bibliografis. Analisis dilakukan melalui heuristik, kritik eksternal dan internal, interpretasi, serta sintesis historiografis. Pembacaan teoretis memakai politik representasi Spivak, solidaritas lintas batas Mohanty, dan hubungan gender-bangsa Yuval-Davis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Ratu Kalinyamat menjalankan otoritas dinastik yang diakui dalam ruang politik yang didominasi laki-laki. Perlawanan terhadap Portugis bertumpu pada koalisi antarkerajaan dan basis ekonomi maritim. Ekspedisi tersebut tidak mengakhiri kekuasaan Portugis di Malaka. Karena itu, perbedaan angka kapal dan pasukan harus dibaca secara kritis. Artikel ini tidak menyebut Ratu Kalinyamat sebagai feminis yang menyatakan identitasnya sendiri atau sebagai subjek subaltern. Feminisme postkolonial digunakan untuk menjelaskan politik representasi, watak kolektif perlawanan, dan hubungan antara kapasitas ekonomi dengan kedaulatan politik.

Kata kunci: Feminisme postkolonial, Ratu Kalinyamat, resistensi antikolonial

Pendahuluan

Ratu Kalinyamat menempati posisi penting dalam sejarah pesisir utara Jawa pada abad ke-16. Ia memerintah Jepara sekitar 1549–1579 setelah krisis politik yang mengikuti kemunduran Kesultanan Demak. Berbagai kajian mengaitkan kekuasaannya dengan pemulihan perdagangan dan penguatan pelabuhan. Kajian tersebut juga membahas pembentukan armada laut serta ekspedisi militer melawan Portugis di Malaka. Sumber Portugis menggambarkan sebagai penguasa Jepara yang kaya dan berkuasa. Sebutan itu menunjukkan bahwa otoritasnya diakui oleh pihak yang berada di seberang kepentingan politik Jepara (de Graaf & Pigeaud, 1985; Rejeki, 2019; Emalia & Pradjoko, 2025).

Kedudukan seorang perempuan sebagai penguasa muslim pada masa awal modern tidak dapat dianggap sebagai kejadian yang sepenuhnya terpisah dari konteks Asia. Andaya (2023) menunjukkan bahwa kekuasaan perempuan hadir di sejumlah masyarakat muslim Asia. Kehadirannya selalu dinegosiasikan melalui garis keturunan, legitimasi agama, kebutuhan dinasti, dan situasi politik setempat. Kerangka perbandingan ini penting agar Ratu Kalinyamat tidak digambarkan sebagai pengecualian yang berdiri sendiri. Ia muncul dari struktur dinastik Demak. Namun, ia juga menjalankan keputusan politik dan militer yang membuat kewenangannya tidak dapat dipersempit menjadi hak waris semata.

Kajian tentang Ratu Kalinyamat telah berkembang dalam beberapa arah. Supriyono (2013) menempatkan Jepara sebagai kerajaan maritim dan kota pelabuhan. Sofiana (2017) menguraikan proses politik yang mengantarkan Ratu Kalinyamat menjadi penguasa. Rejeki (2019) membahas perannya dalam perkembangan Kota Jepara. Azmi (2024) menelaah jejak kepemimpinannya melalui julukan yang beredar dalam sumber Portugis. Studi lain menyoroti ekspansi Jepara serta pertahanan laut (Laily et al., 2023; Hana & Wijaya, 2024). Strategi maritimnya dikaji lebih khusus oleh Emalia dan Pradjoko (2025). Kumpulan penelitian ini menyediakan fondasi sejarah yang memadai. Meski demikian, sebagian tulisan masih menyatukan angka armada koalisi dengan sumbangan khusus Jepara. Ada pula tulisan yang menyebut ekspedisi 1574 sebagai kemenangan final atas Portugis. Kesimpulan tersebut tidak sejalan dengan fakta bahwa Portugis tetap menguasai Malaka setelah serangan itu.

Kajian budaya dan gender membuka arah pembacaan yang berbeda. Said (2013) menelaah banyaknya makna yang dilekatkan pada kisah *tapa wuda sinjang rambut*. Wati dan Lestari (2023) membahas ingatan lokal melalui tradisi Baratan. Latujtaba dan Nugraheni (2025) mengkaji representasi kepemimpinan Ratu Kalinyamat dalam narasi antikolonial. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa tokoh sejarah tidak hanya hidup di dalam catatan peristiwa. Ia juga dibentuk oleh cerita, ritual, pendidikan, dan bahasa politik masa kini. Masalahnya, perpindahan dari data sejarah menuju klaim feminisme sering dilakukan terlalu cepat. Istilah modern lalu ditempelkan pada tokoh abad ke-16 tanpa penjelasan tentang batas analisisnya.

Artikel ini memakai feminisme postkolonial sebagai perangkat baca masa kini. Istilah tersebut bukan identitas yang secara sadar dinyatakan oleh Ratu Kalinyamat. Perbedaan ini mencegah anakronisme. Perbedaan itu juga menjaga agar sejarah tidak dipaksa mengikuti kategori politik yang baru dirumuskan berabad-abad kemudian. Dengan cara ini, tindakan Ratu Kalinyamat dapat dianalisis dari sisi gender, representasi, dan antikolonialisme tanpa menghapus jarak antara pengalaman abad ke-16 dan bahasa teoretis kontemporer.

Pemakaian gagasan Spivak juga memerlukan kehati-hatian. Ratu Kalinyamat adalah penguasa dinastik. Ia mengendalikan sumber daya politik, ekonomi, dan militer. Karena itu, ia tidak tepat disebut subaltern dalam pengertian posisi yang terputus dari akses terhadap institusi kekuasaan. Pertanyaan yang lebih berguna ialah bagaimana suaranya hadir melalui sumber yang ditulis orang lain. Catatan Portugis, babad, tradisi lisan, dan historiografi modern memiliki kepentingan serta jarak waktu yang berbeda. Politik representasi bekerja pada setiap lapisan tersebut (Spivak, 1988).

Mohanty (2003) membantu membaca perlawanan tanpa menjadikan satu tokoh sebagai pusat tunggal sejarah. Ekspedisi Jepara melibatkan pelaut dan prajurit dalam jumlah besar. Pejabat pelabuhan, pembuat kapal, pedagang, serta sekutu dari kerajaan lain juga menopangnya. Perlawanan itu lahir dari kepentingan politik yang beririsan dengan perdagangan dan agama. Dengan demikian, tindakan Ratu Kalinyamat lebih tepat ditempatkan dalam solidaritas regional yang dibangun melalui koalisi. Fokus ini menghindari gambaran tentang pahlawan tunggal yang mampu menggerakkan sejarah tanpa dukungan struktur sosial.

Kerangka Yuval-Davis (1997) dipakai untuk memeriksa hubungan gender dengan komunitas politik. Kekuasaan Ratu Kalinyamat menunjukkan bahwa perempuan dapat berada di pusat pembentukan dan pertahanan suatu wilayah. Akan tetapi, kehadiran perempuan di puncak kekuasaan tidak otomatis membuktikan kesetaraan gender bagi seluruh penduduk. Data yang tersedia belum memberi gambaran rinci tentang kehidupan perempuan biasa di Jepara. Karena itu, artikel ini membedakan otoritas politik seorang ratu dari kondisi sosial perempuan secara umum.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana posisi Ratu Kalinyamat sebagai penguasa perempuan dibentuk oleh sumber sejarah yang berbeda? Kedua, bagaimana koalisi militer dan ekonomi maritim menopang perlawanan Jepara terhadap Portugis? Ketiga, sejauh mana feminisme postkolonial dapat menjelaskan kasus ini tanpa menjadikannya klaim identitas yang anakronistik? Kebaruan artikel terletak pada penggabungan kritik sumber dengan tiga lensa teoretis. Pendekatan ini dipakai untuk menilai politik representasi, watak kolektif perlawanan, dan hubungan antara gender dengan kedaulatan ekonomi.

Metode

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif historis-kepuustakaan. Desain tersebut dipilih karena pertanyaan penelitian berhubungan dengan peristiwa abad ke-16 dan cara peristiwa itu ditulis kembali. Data penelitian tidak berasal dari wawancara atau observasi lapangan. Seluruh analisis bertumpu pada sumber terbitan yang identitas bibliografisnya dapat diperiksa. Batas ini membuat proses pemilihan dan penilaian sumber lebih mudah ditelusuri.

Korpus sumber terdiri atas artikel jurnal, buku sejarah, laporan penelitian, dan karya teoretis. Sumber sejarah dipilih jika membahas masa pemerintahan Ratu Kalinyamat, jaringan maritim Demak-Jepara, perdagangan pesisir, atau ekspedisi menuju Malaka. Sumber teoretis dipilih jika menjelaskan representasi, solidaritas feminis lintas batas, atau hubungan gender dengan bangsa. Setiap sumber harus memiliki penulis dan data penerbitan yang dapat dilacak. Tulisan populer yang tidak menyebut dasar sumber tidak digunakan sebagai landasan klaim faktual.

Kedudukan sumber dibedakan berdasarkan jaraknya dari peristiwa. Catatan Portugis dan sumber lokal yang diterbitkan kembali diperlakukan sebagai sumber awal yang sudah melalui proses penyuntingan atau penerjemahan. Buku sintesis sejarah dipakai untuk menilai konteks dan membandingkan pembacaan. Artikel ilmiah mutakhir dipakai untuk melihat perkembangan interpretasi. Pembedaan ini tidak menjadikan satu kelompok sumber selalu lebih benar. Ia membantu peneliti memahami asal suatu angka, sebutan, atau kesimpulan.

Analisis mengikuti empat tahap metode sejarah: heuristik; kritik sumber; interpretasi; dan historiografi (Sjamsuddin, 2007). Pada tahap heuristik, sumber yang relevan dihimpun dan dikelompokkan berdasarkan tema. Kritik eksternal dilakukan dengan memeriksa identitas penulis dan tahun terbit. Pemeriksaan juga mencakup penerbit serta hubungan karya dengan sumber yang dirujuk. Kritik internal menilai konsistensi isi. Tahap ini terutama digunakan ketika sumber memberikan angka kapal atau pasukan yang berbeda. Hal yang sama diterapkan pada data korban dan tahun ekspedisi.

Perbedaan data tidak diselesaikan dengan memilih angka terbesar. Penelitian menelusuri apakah angka tersebut merujuk pada seluruh koalisi atau hanya kontingen Jepara. Tahun

permintaan bantuan juga dibedakan dari tahun keberangkatan dan pertempuran. Jika perbedaan tetap tidak dapat dipastikan, artikel menyajikannya sebagai rentang atau catatan perbandingan. Cara ini lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada menyatukan semua keterangan menjadi satu kronologi yang tampak pasti.

Pada tahap interpretasi, data dikelompokkan ke dalam empat tema. Tema tersebut ialah legitimasi kepemimpinan, perlawanan antikolonial, ekonomi maritim, dan pembentukan ingatan budaya. Setelah itu, setiap tema dibaca melalui tiga konsep. Spivak dipakai untuk menilai siapa yang mewakili suara Ratu Kalinyamat. Mohanty dipakai untuk melihat pembentukan solidaritas lintas wilayah. Yuval-Davis dipakai untuk menguji hubungan antara gender, keanggotaan politik, dan kedaulatan. Tahap historiografi menyatukan hasil kritik sumber dan pembacaan teoretis dalam uraian yang tidak memisahkan ekonomi dari politik.

Metode ini mempunyai dua batas. Pertama, sebagian sumber Portugis dan sumber lokal diakses melalui edisi terbitan serta kajian sejarah berikutnya. Artikel ini tidak melakukan kajian filologis terhadap naskah asli. Kedua, sumber yang tersedia lebih banyak menjelaskan penguasa dan institusi. Pengalaman perempuan nonelite tidak terdokumentasi secara memadai. Batas tersebut menjadi dasar untuk menahan klaim tentang dampak sosial kepemimpinan Ratu Kalinyamat terhadap seluruh perempuan Jepara.

Hasil dan Pembahasan

Kedudukan Sumber dan Konteks Kekuasaan

Ratu Kalinyamat dikenal sebagai Retna Kencana. Ia merupakan putri Sultan Trenggana dan berada dalam garis dinasti Demak. Setelah Sunan Prawata dan Sultan Hadlirin meninggal dalam konflik politik, pusat kekuasaan Demak mengalami perubahan. Retna Kencana kemudian memerintah Jepara. Banyak penelitian menggunakan 1549 sebagai awal pemerintahannya dan 1579 sebagai akhir masa kekuasaan (Sofiana, 2017; Rejeki, 2019). Kronologi ini cukup konsisten untuk menjadi batas kajian. Tanggal kelahirannya tidak memiliki dasar yang sama kuat. Karena itu, artikel ini tidak mengulang perkiraan tahun lahir seolah-olah merupakan fakta pasti.

Nama Kalinyamat berkaitan dengan wilayah kekuasaan atau tempat kedudukannya. Sumber Portugis mengenal Jepara sebagai pusat yang memiliki penguasa perempuan kuat. Catatan itu penting karena memperlihatkan pengakuan eksternal terhadap otoritas Ratu Kalinyamat. Namun, catatan Portugis juga lahir dari situasi persaingan politik dan perang. Gambaran tentang “perempuan berani” dapat memuat kekaguman sekaligus penandaan terhadap lawan. Sebutan tersebut tidak boleh dipakai sebagai bukti tunggal tentang kepribadian atau kebijakan pemerintahannya (de Graaf & Pigeaud, 1985; Emalia & Pradjoko, 2025).

Sumber lokal membawa masalah yang berbeda. Babad dan tradisi lisan sering menghubungkan kekuasaan Ratu Kalinyamat dengan konflik keluarga, pertapaan, dan tuntutan keadilan. Unsur tersebut penting untuk memahami legitimasi budaya. Meskipun demikian, karya semacam itu tidak selalu disusun untuk mencatat peristiwa dengan ukuran kronologi modern. Sulistyanto (2019) mengingatkan bahwa batas antara sejarah dan mitos dalam kisah Ratu Kalinyamat perlu diuji. Oleh sebab itu, cerita lokal dibaca sebagai jejak ingatan sosial sekaligus kemungkinan informasi historis. Keduanya tidak disamakan begitu saja.

Historiografi modern juga tidak bebas dari pilihan representasi. Sebagian tulisan mengutamakan keberanian personal. Sebagian lain menonjolkan kejayaan maritim. Karya pendidikan cenderung memilih nilai keteladanan. Tulisan gender menyoroti kepemimpinan perempuan. Setiap fokus membuat aspek tertentu tampak lebih besar daripada yang lain. Kritik sumber membantu menunjukkan bahwa sosok Ratu Kalinyamat yang sampai kepada pembaca merupakan hasil pertemuan berbagai suara. Tidak seluruh suara itu berasal langsung darinya.

Kesadaran atas kedudukan sumber mengubah cara artikel ini menggunakan data. Angka armada diperlakukan sebagai hasil laporan yang perlu dibandingkan. Julukan Portugis dibaca sebagai representasi dari pihak lawan. Kisah spiritual dibaca melalui sejarah penerimaan masyarakat. Kebijakan ekonomi dinilai melalui bukti tentang pelabuhan, komoditas, jaringan perdagangan, dan armada. Dengan demikian, analisis tidak bergantung pada satu citra tentang ratu yang dianggap mampu menjelaskan semua hal.

Kepemimpinan Perempuan dan Politik Representasi

Ratu Kalinyamat memperoleh legitimasi dari garis keturunan dan perubahan politik setelah runtuhnya keseimbangan Demak. Dasar dinastik tersebut tidak mengurangi kenyataan bahwa ia memegang kewenangan pemerintahan. Ia menjaga hubungan dengan pusat-pusat kekuasaan lain, mengatur perdagangan, dan mengirim armada perang. Sofiana (2017) menunjukkan bahwa wilayah Jepara berkembang kembali di bawah pemerintahannya. Rejeki (2019) juga menempatkan konsolidasi ekonomi sebagai bagian penting dari kekuasaan itu. Bukti tersebut menunjukkan praktik otoritas. Ia tidak sekadar berperan sebagai simbol keluarga kerajaan.

Kepemimpinan perempuan pada masa itu tetap berhadapan dengan tata politik yang lebih sering menempatkan laki-laki sebagai raja, panglima, dan pejabat. Akan tetapi, istilah patriarki perlu digunakan secara terukur. Tidak tersedia data yang cukup untuk menyatakan bahwa semua perempuan Jawa abad ke-16 dilarang terlibat dalam urusan publik. Andaya (2023) memperlihatkan bahwa ratu muslim dapat memperoleh ruang kekuasaan ketika legitimasi dinasti dan kebutuhan politik mendukungnya. Kasus Ratu Kalinyamat berada dalam pola negosiasi tersebut. Ia bekerja di dalam struktur dinastik. Pada saat yang sama, ia memperluas kemungkinan tentang siapa yang dapat memerintah.

Kedudukan itu membantah anggapan bahwa kewenangan militer dan ekonomi hanya dapat dijalankan oleh laki-laki. Namun, pembuktian tersebut tidak cukup untuk menyimpulkan terjadinya perubahan sosial bagi semua perempuan. Sumber yang ada lebih banyak merekam aktivitas istana, pelabuhan, dan perang. Tidak ada data memadai tentang pembagian kerja berdasarkan gender, akses perempuan biasa terhadap sumber daya, atau perubahan hukum selama pemerintahannya. Karena itu, temuan utama artikel ini terletak pada otoritas politik seorang perempuan. Temuan itu berbeda dari klaim tentang kesetaraan gender di tingkat masyarakat.

Dalam kerangka Spivak (1988), persoalan utamanya bukan apakah Ratu Kalinyamat “dapat berbicara” secara harfiah. Ia memiliki posisi yang memungkinkan keputusan politik dijalankan. Persoalannya ialah akses pembaca masa kini terhadap suara tersebut. Hampir seluruh pengetahuan tentang dirinya datang melalui penulis lain. Catatan kolonial awal, tradisi lokal, dan sejarawan modern berbicara atas namanya dengan bahasa masing-masing. Situasi ini menuntut pembacaan terhadap proses representasi. Ia juga menuntut pembatasan terhadap klaim psikologis yang tidak didukung sumber.

Atas dasar itu, artikel ini tidak menyebut Ratu Kalinyamat sebagai subaltern. Penyebutan tersebut akan mengabaikan kedudukannya sebagai elite penguasa. Kontribusi Spivak justru terletak pada kritik terhadap cara seorang tokoh perempuan disajikan. Historiografi yang hanya memuji keberanian dapat menutup institusi dan tenaga kolektif yang menopang pemerintahannya. Sebaliknya, historiografi yang hanya menekankan garis keturunan dapat meremehkan keputusan yang ia ambil. Politik representasi membantu menahan dua penyederhanaan tersebut.

Representasi juga tampak pada penggunaan julukan. Ungkapan *de Kranige Dame* beredar luas sebagai bukti keberanian. Bentuk dan asal ungkapan itu perlu dikutip secara konsisten. Lebih penting lagi, julukan tidak dapat menggantikan analisis. Pengakuan lawan memperlihatkan reputasi politik dan militer. Ia tidak membuktikan semua kualitas kepemimpinan yang kemudian dilekatkan kepadanya. Penilaian seperti visioner, demokratis, atau penuh empati memerlukan data

kebijakan yang lebih khusus. Naskah ini karena itu memilih menjelaskan tindakan yang dapat ditelusuri.

Perlawanan terhadap Portugis sebagai Kerja Koalisi

Pendudukan Portugis atas Malaka sejak 1511 mengubah jaringan perdagangan dan keseimbangan politik di kawasan. Malaka merupakan simpul yang menghubungkan Samudra Hindia dengan Semenanjung Melayu. Jalur itu juga tersambung dengan Jawa dan pusat rempah di bagian timur Nusantara. Penguasaan Portugis memberi mereka posisi untuk mengatur akses dagang dan memperkuat basis militer. Kerajaan-kerajaan muslim di kawasan kemudian membangun serangkaian perlawanan. Jepara berada di dalam jaringan itu. Karena itu, ekspedisi Ratu Kalinyamat bukan perang bilateral. Ekspedisi tersebut terkait dengan kepentingan Johor, Aceh, dan pusat kekuasaan lain (Meilink-Roelofs, 1962; Hamid, 2025).

Ekspedisi 1551 dilakukan untuk membantu Johor menyerang Portugis di Malaka. Rekonstruksi yang sering dipakai menyebut sekitar 200 kapal untuk keseluruhan persekutuan. Dari jumlah itu, sekitar 40 kapal berasal dari Jepara dan membawa 4.000–5.000 prajurit. Perbedaan antara kekuatan koalisi dan kontribusi Jepara penting dipertahankan. Jika angka 200 kapal disebut sebagai armada Ratu Kalinyamat, kapasitas Jepara akan tampak lebih besar daripada keterangan sumber. Serangan tersebut tidak berhasil merebut Malaka. Meski gagal, pengiriman kontingen menunjukkan kemampuan Jepara menyiapkan pelayaran militer lintas wilayah (de Graaf & Pigeaud, 1985, p. 130; Hayati et al., 2000; Emalia & Pradjoko, 2025, pp. 135–136).

Hubungan antarkerajaan berlanjut pada dekade berikutnya. Kajian sejarah menyebut keterlibatan jaringan Aceh-Jawa dalam serangan 1568. Namun, data mengenai bagian khusus Jepara tidak selalu dipisahkan dari kekuatan Aceh dan sekutu lain. Oleh karena itu, artikel ini tidak menempatkan 1568 sebagai ekspedisi Jepara yang berdiri sendiri. Peristiwa tersebut lebih aman dibaca sebagai bagian dari rangkaian tekanan regional terhadap Portugis. Perbedaan ini mencegah penghitungan serangan yang sekadar menggabungkan seluruh operasi koalisi ke dalam biografi satu penguasa.

Ekspedisi besar berikutnya berlangsung pada 1574. Sejumlah tulisan menyebut 1573 karena pada tahun itu proses permintaan bantuan dan persiapan telah berjalan. Pertempuran utama berlangsung pada 1574. Rekonstruksi yang banyak dikutip menyebut sekitar 300 kapal layar. Di dalamnya terdapat sekitar 70–80 jung berukuran besar dan sekitar 15.000 prajurit. Angka tersebut masih harus dibaca sebagai perkiraan yang diturunkan dari laporan berbeda. Armada Jepara sempat memblokir Malaka. Portugis akhirnya mematahkan serangan. Korban di pihak Jawa besar dan Malaka tidak berhasil direbut (Supriyono, 2013; Hana & Wijaya, 2024; Emalia & Pradjoko, 2025, pp. 138–140).

Tabel 1. Perbandingan dua ekspedisi utama Jepara ke Malaka

Periode	Mitra dan tujuan	Kekuatan yang disebut	yang sering	Hasil	Catatan kritik sumber
1551	Membantu Johor menyerang Portugis di Malaka	Sekitar 200 kapal untuk koalisi; sekitar 40 kapal Jepara dengan 4.000–5.000 prajurit		Malaka tidak direbut	Jumlah koalisi harus dibedakan dari kontribusi Jepara
1573–1574	Persiapan bantuan terkait Aceh dan serangan besar ke Malaka	Sekitar 300 kapal; 70–80 jung besar; sekitar 15.000 prajurit	sekitar	Blokade dipatahkan dan Malaka tetap dikuasai Portugis	Tahun permintaan bantuan berbeda dari tahun pertempuran; angka bervariasi menurut sumber

Sumber: disusun dari de Graaf dan Pigeaud (1985), Hayati et al. (2000), Supriyono (2013), serta Emalia dan Pradjoko (2025).

Tabel 1 tersebut tidak dimaksudkan untuk menghasilkan kepastian baru dari data yang memang berbeda. Fungsinya ialah memperjelas satuan yang sering tercampur. Angka kapal dapat merujuk pada seluruh koalisi, kapal Jepara, kapal besar, atau kapal pendukung. Begitu pula dengan angka pasukan. Beberapa tulisan memakai jumlah awal keberangkatan. Tulisan lain menyebut korban atau sisa pasukan. Tanpa penjelasan tentang kategori, angka besar mudah berubah menjadi hiasan kepahlawanan.

Hasil ekspedisi juga perlu dinyatakan dengan tepat. Perlawanan Jepara membebani pertahanan Portugis dan menunjukkan bahwa penguasaan Malaka terus ditentang. Akan tetapi, Portugis tidak meninggalkan Malaka akibat ekspedisi Ratu Kalinyamat. Klaim bahwa Jawa “terbebas” setelah serangan 1574 juga tidak tepat karena tujuan perang berada di Malaka. Temuan ini tidak mengurangi arti politik perlawanan. Kegagalan merebut kota tetap dapat berjalan bersama dampak strategis berupa tekanan militer, gangguan perdagangan, dan penguatan hubungan antarkerajaan.

Mohanty (2003) membantu menafsirkan struktur kolektif tersebut. Perlawanan antikolonial tidak lahir dari identitas perempuan yang tunggal. Ia dibentuk oleh kepentingan yang saling bertemu. Jepara membutuhkan jalur dagang yang lebih bebas. Johor dan Aceh menghadapi ancaman Portugis secara langsung. Para pedagang dan pelaut berkepentingan pada keamanan pelayaran. Solidaritas dalam konteks ini bersifat politis dan material. Ia tidak harus berarti bahwa seluruh anggota koalisi mempunyai tujuan yang sama dalam setiap urusan.

Pembacaan kolektif juga mengubah posisi Ratu Kalinyamat. Keberhasilannya bukan diukur dari kemampuannya bertindak sendirian. Kapasitas kepemimpinan tampak pada kemampuan menghimpun sumber daya, mengirim kontingen, dan menjaga hubungan dengan sekutu. Di sisi lain, keputusan perang membawa biaya manusia yang besar. Catatan tentang korban perlu hadir agar sejarah tidak berubah menjadi pujian tanpa konsekuensi. Kritik feminis terhadap kekuasaan seharusnya tidak mengganti kultus pahlawan laki-laki dengan kultus pahlawan perempuan.

Ekonomi Maritim sebagai Basis Kedaulatan

Kekuatan militer Jepara tidak dapat dipisahkan dari kedudukannya sebagai kota pelabuhan. Pesisir utara Jawa menghubungkan produksi pedalaman dengan pasar antarpulau. Jepara dan pelabuhan di sekitarnya menjadi tempat pengumpulan, pemuatan, dan distribusi barang. Beras merupakan salah satu komoditas penting. Produksinya berasal dari daerah belakang atau *hinterland*, kemudian dialirkan menuju pelabuhan. Karena itu, pernyataan bahwa beras “diekspor ke hinterland” perlu dibalik. Hinterland adalah wilayah pemasok yang terhubung dengan pasar maritim (Supriyono, 2013; Hamid, 2025; Emalia & Pradjoko, 2025).

Jaringan perdagangan Jepara mencakup Malaka dan Aceh. Jalurnya juga mencapai Jambi, Maluku, serta pelabuhan lain di Jawa. Barang yang bergerak tidak hanya beras. Kajian sejarah menyebut kayu dan gula. Madu, garam, serta hasil pertanian lain juga diperdagangkan. Jepara menerima komoditas dari wilayah timur untuk diteruskan ke pasar yang lebih luas. Perdagangan semacam itu menunjukkan hubungan saling bergantung antara pelabuhan, pedalaman, dan rute pelayaran. Kekuatan ekonomi bukan hasil satu kebijakan tunggal. Posisi geografis dan tenaga kerja ikut membentuknya. Keamanan pelabuhan, modal, serta hubungan politik juga berpengaruh (Meilink-Roelofs, 1962; Rejeki, 2019; Nasution & Himawan, 2021).

Sofiana (2017) menjelaskan penggunaan sistem *commenda* dalam perdagangan pesisir. Dalam bentuk umum, sistem ini mempertemukan pemilik modal dengan pelaksana pelayaran. Modal ditanamkan pada perjalanan dagang dan keuntungan dibagi menurut kesepakatan. Konsep tersebut membantu menjelaskan bagaimana perdagangan jarak jauh dapat dibiayai. Namun, sumber yang tersedia belum cukup untuk memetakan aturan, pelaku, dan pembagian hasil secara rinci pada masa Ratu Kalinyamat. Oleh sebab itu, *commenda* sebaiknya disebut sebagai mekanisme yang

terkait dengan lingkungan niaga Jepara. Ia tidak perlu digambarkan sebagai program ekonomi yang sepenuhnya dirancang oleh satu orang.

Industri perkapalan memberi hubungan langsung antara ekonomi dan pertahanan. Pantai utara Jawa memiliki tradisi pembuatan kapal serta akses terhadap kayu dari wilayah pedalaman. Kapal dipakai untuk perdagangan dan angkutan. Kapal juga digunakan dalam perang. Ukuran armada yang dikirim ke Malaka menunjukkan kemampuan logistik yang besar meskipun angka tepatnya diperdebatkan. Kajian maritim mutakhir menempatkan galangan dan pelabuhan sebagai bagian dari kekuatan Jepara. Kajian tersebut juga menekankan peran pelaut (Laily et al., 2023; Hana & Wijaya, 2024; Emalia & Pradjoko, 2025). Bukti ini cukup untuk menyebut adanya kapasitas perkapalan. Ia belum cukup untuk menghitung lapangan kerja atau tingkat inovasi teknis secara pasti.

Hubungan antara perdagangan dan perang terlihat dalam kebutuhan penyediaan kapal, perbekalan, awak, serta senjata. Ekspedisi berjarak jauh tidak mungkin berlangsung tanpa surplus dan organisasi pelabuhan. Sebaliknya, keamanan jalur laut mendukung perdagangan. Lingkaran ini membuat ekonomi maritim menjadi dasar kedaulatan. Jepara dapat mengambil keputusan politik karena memiliki sarana untuk mengangkut pasukan dan menjaga hubungan dengan sekutu. Kemandirian dalam konteks ini tidak berarti terpisah dari jaringan luar. Justru kemampuan membangun hubungan yang lebih setara menjadi sumber daya utama.

Kerangka Yuval-Davis (1997) membantu melihat bagaimana komunitas politik dibentuk melalui pembagian peran dan batas keanggotaan. Pada kasus Jepara, ratu berada di pusat keputusan tentang wilayah. Ia juga berwenang atas pelabuhan dan pertahanan. Kehadirannya memperlihatkan bahwa perempuan dapat mewakili otoritas politik. Namun, ekonomi maritim tetap dijalankan oleh banyak kelompok sosial. Pedagang dan petani memikul fungsi yang berbeda. Pengrajin kapal, pelaut, serta prajurit juga menjadi bagian dari sistem tersebut. Negara atau kerajaan tidak dapat disamakan dengan penguasanya.

Dari sudut feminisme postkolonial, nilai penting kebijakan ekonomi Ratu Kalinyamat terletak pada hubungan antara kemampuan material dan ruang bertindak politik. Kekuasaan perempuan tidak hanya dibuktikan melalui simbol atau gelar. Ia terlihat dalam kapasitas mengelola institusi dan menggerakkan sumber daya. Pada saat yang sama, artikel ini tidak menyebut seluruh kebijakan tersebut sebagai pemberdayaan perempuan. Tidak ada bukti cukup tentang distribusi manfaat ekonomi berdasarkan gender. Kesimpulan yang dapat dipertahankan ialah bahwa seorang perempuan memimpin ekonomi politik maritim dan memakai kapasitas itu untuk mempertahankan kepentingan wilayahnya.

Narasi Spiritual dan Legitimasi Budaya

Kisah *tapa wuda sinjang rambut* merupakan bagian paling terkenal sekaligus paling diperdebatkan dari ingatan tentang Ratu Kalinyamat. Cerita itu berkaitan dengan kematian Sultan Hadlirin dan tuntutan keadilan terhadap Arya Penangsang. Pembacaan harfiah sering menempatkan pertapaan sebagai tindakan telanjang. Pembacaan simbolik melihatnya sebagai pelepasan atribut duniawi, pengosongan diri, atau penolakan terhadap ketidakadilan. Said (2013) menunjukkan bahwa makna kisah tersebut tidak tunggal. Perbedaan tafsir justru menjadi bagian penting dari kehidupan tradisi.

Artikel ini tidak memakai kisah pertapaan sebagai laporan faktual yang pasti. Jarak waktu sumber dan kuatnya unsur simbolik membuat klaim semacam itu sulit dibuktikan. Cerita tersebut lebih berguna untuk melihat cara masyarakat membangun legitimasi moral seorang penguasa. Kesedihan pribadi diubah menjadi laku spiritual. Laku itu kemudian dihubungkan dengan keberanian menuntut keadilan dan kesiapan memimpin. Proses tersebut memperlihatkan pertemuan antara sejarah politik dan ingatan budaya.

Tradisi Baratan dan narasi lokal membuat ingatan tentang Ratu Kalinyamat terus bergerak di luar teks sejarah (Wati & Lestari, 2023). Ingatan itu dapat memperkuat identitas daerah dan menyediakan simbol kepemimpinan perempuan. Namun, fungsi budaya tidak menjadikan semua detail cerita sebagai data peristiwa. Pemisahan antara nilai simbolik dan kepastian faktual perlu dijaga. Sikap ini menghormati tradisi tanpa melepaskan kritik sejarah.

Politik representasi kembali terlihat di sini. Tubuh perempuan mudah menjadi pusat penafsiran yang bersifat moral atau sensasional. Jika kisah *tapa wuda* hanya dibaca melalui ketelanjangan, tindakan politik dan spiritual tokoh dapat terpinggirkan. Sebaliknya, jika seluruh kisah langsung disucikan, perbedaan versi dan proses pembentukan mitos akan hilang. Pembacaan postkolonial menanyakan siapa yang memberi makna, pada masa apa, dan untuk kepentingan apa. Pertanyaan tersebut lebih produktif daripada mencari satu tafsir yang menutup semua kemungkinan.

Sintesis Feminisme Postkolonial

Ketiga lensa teoretis menghasilkan temuan yang saling melengkapi. Spivak mengarahkan perhatian pada perantara yang membuat Ratu Kalinyamat hadir dalam historiografi. Sumber Portugis menulisnya sebagai lawan yang kuat. Tradisi lokal memberi legitimasi moral dan spiritual. Kajian modern memilih aspek yang sesuai dengan fokus penelitian. Tidak ada akses langsung yang utuh terhadap suara Ratu Kalinyamat. Karena itu, tanggung jawab peneliti ialah menyebut batas sumber dan menghindari penyandaran gagasan modern sebagai ucapan tokoh.

Mohanty menolong artikel ini keluar dari feminisme yang hanya merayakan keberhasilan individual. Kekuasaan Ratu Kalinyamat memiliki arti karena terhubung dengan kerja kolektif. Armada memerlukan pembuat kapal dan pelaut. Perdagangan memerlukan petani, pedagang, serta pengelola pelabuhan. Perang memerlukan sekutu. Kerja sama dengan Johor, Aceh, dan jaringan lain menunjukkan bahwa perlawanan terhadap Portugis dibangun lintas wilayah. Solidaritas tersebut tidak romantis. Ia lahir dari ancaman dan kepentingan yang konkret.

Yuval-Davis menempatkan gender di dalam pembentukan komunitas politik. Ratu Kalinyamat bukan tambahan perempuan dalam cerita kerajaan yang tetap dianggap milik laki-laki. Ia adalah pemegang otoritas yang ikut menentukan arah wilayah. Posisi itu mengganggu gambaran sederhana tentang penguasa sebagai laki-laki. Namun, analisis gender tidak berhenti pada jenis kelamin pemimpin. Ia juga menanyakan siapa yang termasuk dalam narasi bangsa atau kerajaan. Keterbatasan sumber tentang kelompok nonelite menunjukkan bahwa historiografi masih berpusat pada istana.

Sintesis tersebut menghasilkan batas konseptual yang jelas. Ratu Kalinyamat tidak disebut feminis dalam arti identitas politik modern. Ia juga tidak disebut subaltern. Meski demikian, pemerintahannya merupakan kasus penting bagi feminisme postkolonial. Kasus ini memperlihatkan perempuan yang menggunakan otoritas dinastik di tengah persaingan kolonial awal. Ia juga memperlihatkan bahwa kedaulatan membutuhkan basis ekonomi dan jaringan solidaritas. Analisis semacam ini menempatkan teori sebagai alat untuk mengajukan pertanyaan. Teori tidak dipakai untuk menggantikan data sejarah.

Istilah antikolonial juga perlu diberi konteks. Portugis pada abad ke-16 membangun kekuasaan militer dan monopoli dagang dari Malaka. Perlawanan Jepara ditujukan pada dominasi tersebut. Namun, pelaku sejarah tidak memakai nasionalisme Indonesia seperti yang dikenal sekarang. Mereka bergerak melalui kerajaan dan kota pelabuhan. Agama, jaringan dagang, serta persekutuan regional juga menjadi pengikat. Menyebut tindakan itu antikolonial dapat dibenarkan jika merujuk pada penolakan terhadap dominasi Portugis. Istilah tersebut tidak boleh digunakan untuk memindahkan negara-bangsa modern ke masa sebelumnya.

Relevansi Kontemporer

Relevansi Ratu Kalinyamat bagi masa kini bersifat konseptual. Sejarahnya tidak menyediakan rancangan kebijakan yang dapat diterapkan tanpa perubahan. Kondisi kerajaan maritim abad ke-16 sangat berbeda dari negara modern. Meskipun demikian, ada beberapa pertanyaan yang tetap berguna. Pertama, kepemimpinan perempuan perlu dinilai melalui kewenangan dan keputusan, bukan melalui stereotip sifat feminin. Kedua, kedaulatan politik memerlukan kapasitas ekonomi dan institusi. Ketiga, perlawanan terhadap dominasi yang melampaui batas wilayah membutuhkan koalisi.

Pelajaran tersebut dapat dipakai dalam pendidikan sejarah. Ratu Kalinyamat dapat dikenalkan sebagai penguasa dengan pilihan politik yang kompleks. Ia bukan sekadar tokoh berani. Ia menghadapi konflik dinasti, mengelola pelabuhan, membangun hubungan dagang, dan mengirim pasukan dalam perang yang berakhir dengan kerugian besar. Penyajian ini membuat keteladanan lebih dewasa. Siswa dapat belajar bahwa kepemimpinan mengandung kemampuan, keterbatasan, dan konsekuensi.

Pembacaan ekonomi juga perlu menghindari penggunaan istilah neokolonialisme secara longgar. Menghubungkan kebijakan Jepara langsung dengan penguasaan sumber daya oleh perusahaan multinasional masa kini memerlukan penelitian tersendiri. Artikel ini membatasi relevansi pada prinsip kemampuan institusional, pengelolaan sumber daya, dan posisi tawar dalam jaringan ekonomi. Prinsip tersebut dapat menjadi bahan refleksi. Ia bukan bukti bahwa masalah ekonomi kontemporer sama dengan persaingan Portugis dan Jepara.

Bagi gerakan perempuan, kasus Ratu Kalinyamat menegaskan pentingnya membaca sejarah lokal tanpa menjadikannya dekorasi identitas. Kehadiran seorang ratu dapat membuka ruang imajinasi politik. Namun, agenda kesetaraan masa kini tetap memerlukan data tentang akses dan kerja. Data hukum serta distribusi sumber daya juga dibutuhkan. Sejarah elite tidak dapat menggantikan pengalaman perempuan dari kelompok lain. Justru kesenjangan sumber tersebut dapat mendorong penelitian baru tentang perempuan di pelabuhan dan pasar. Pusat produksi serta komunitas pesisir juga perlu diteliti.

Relevansi terakhir terletak pada etika penulisan sejarah. Tokoh perempuan sering dipuji dengan bahasa yang berlebihan atau dinilai melalui kehidupan pribadinya. Artikel ini menunjukkan pilihan lain. Keberanian dapat dijelaskan melalui keputusan yang terdokumentasi. Kemandirian dapat dinilai melalui kapasitas ekonomi. Spiritualitas dapat dibaca melalui sejarah tafsir. Cara ini menghasilkan penghargaan yang tidak bergantung pada mitologisasi.

Penutup

Ratu Kalinyamat menjalankan otoritas politik yang nyata di Jepara pada paruh kedua abad ke-16. Legitimasi dinasti memberinya jalan menuju kekuasaan. Kemampuan mengelola hubungan politik, perdagangan, pelabuhan, dan armada membuat kekuasaan itu berfungsi. Kehadirannya menantang anggapan bahwa pemerintahan dan perang merupakan ruang yang secara alamiah hanya milik laki-laki. Akan tetapi, data yang ada belum cukup untuk menyimpulkan bahwa pemerintahannya menghasilkan kesetaraan gender bagi seluruh masyarakat.

Perlawanan terhadap Portugis berlangsung melalui kerja koalisi. Pada 1551, Jepara membantu Johor dengan kontingen yang merupakan bagian dari armada persekutuan. Pada 1573–1574, persiapan dan serangan besar kembali dilakukan dalam hubungan dengan Aceh. Kedua ekspedisi tidak merebut Malaka. Nilai historisnya terletak pada kemampuan Jepara mengerahkan sumber daya dan membangun solidaritas regional. Perbedaan angka kapal serta pasukan harus dipertahankan sebagai masalah sumber. Angka itu tidak boleh digabungkan untuk memperbesar citra kepahlawanan.

Ekonomi maritim menjadi dasar penting dari ruang bertindak politik Ratu Kalinyamat. Pelabuhan menghubungkan produksi hinterland dengan perdagangan antarpulau. Jaringan modal, kapal, dan tenaga pelayaran menopang perdagangan sekaligus pertahanan. Dalam perspektif feminisme postkolonial, hubungan tersebut memperlihatkan bahwa otoritas perempuan bekerja melalui institusi dan sumber daya. Temuan ini lebih kuat daripada klaim umum tentang sifat kepemimpinan perempuan.

Artikel ini menempatkan Spivak sebagai kritik atas politik representasi, bukan sebagai dasar untuk menyebut Ratu Kalinyamat subaltern. Mohanty menjelaskan watak kolektif perlawanan. Yuval-Davis membantu membaca hubungan gender dengan komunitas politik. Ketiga lensa tersebut digunakan sebagai perangkat analisis masa kini. Ratu Kalinyamat tidak diklaim sebagai feminis yang menyatakan identitasnya sendiri.

Keterbatasan penelitian terletak pada ketergantungan terhadap edisi terbitan dan sintesis historiografis. Kajian selanjutnya perlu membandingkan naskah Portugis dan sumber lokal secara filologis. Penelitian tentang ingatan publik dapat memakai wawancara atau diskusi kelompok. Metode itu berguna untuk memahami makna Ratu Kalinyamat bagi masyarakat sekarang. Ia tidak dapat menggantikan kritik sumber untuk memastikan peristiwa abad ke-16. Penelitian tentang perempuan nonelite di jaringan pelabuhan Jepara juga diperlukan agar sejarah gender tidak terus berpusat pada istana.

Kontribusi Penulis

OS berkontribusi dalam perumusan konsep penelitian, pengembangan kerangka feminisme poskolonial, metodologi, interpretasi historis, sintesis historiografi, analisis formal, serta penulisan draf awal naskah. UNC berkontribusi dalam penelusuran literatur, identifikasi dan seleksi sumber, kritik sumber internal dan eksternal, validasi bukti historis, serta penyempurnaan interpretasi teoretis. YF berkontribusi dalam verifikasi bibliografi, kajian komparatif terhadap berbagai catatan sejarah, analisis pendukung mengenai ekonomi maritim dan perlawanan terhadap Portugis, serta proses peninjauan dan penyuntingan naskah. Seluruh penulis berkontribusi dalam interpretasi kritis terhadap sumber, diskusi hasil penelitian, serta penguatan argumen terkait representasi, otoritas politik perempuan, perlawanan antikolonial, dan kedaulatan ekonomi. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah ini.

Daftar Pustaka

- Andaya, B. W. (2023). Negotiating ambiguities: Female rule in Muslim Asia during the early modern period. *World History Connected*, 17(3). <https://doi.org/10.13021/whc.v17i3.3676>
- Azmi, I. K. (2024). Jejak kepemimpinan Ratu Kalinyamat (*De Kranige Dame*). *Historia Pedagogia*, 13(2), 32–41. <https://doi.org/10.15294/hp.v13i02.14986>
- de Graaf, H. J., & Pigeaud, T. G. T. (1985). *Kerajaan-kerajaan Islam pertama di Jawa: Kajian sejarah politik abad ke-15 dan ke-16*. Grafitipers.
- Emalia, I., & Pradjoko, D. (2025). The maritime strategy of Queen Kalinyamat in shaping the Demak-Jepara Sultanate, 1549–1579. *JAWI*, 8(2), 128–141. <https://doi.org/10.24042/00202582804900>
- Hamid, A. R. (2025). Jaringan maritim dan Islamisasi Demak abad XV–XVI. *JAWI*, 8(1), 11–26. <https://doi.org/10.24042/00202582766700>
- Hana, M. Y., & Wijaya, D. N. (2024). Ekspansi Jepara abad XVI dan potensinya sebagai suplemen materi pembelajaran sejarah. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sejarah*, 20(1). <https://doi.org/10.21831/istoria.v20i1.72384>

- Hayati, C., Yulianti, D., & Sugiyarto. (2000). *Peranan Ratu Kalinyamat di Jepara pada abad XVI*. Departemen Pendidikan Nasional.
- Laily, A. N., Prakoso, L. Y., & Putri, P. S. (2023). The role of Ratu Kalinyamat in past maritime successes: As a study of archipelago sea defense. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(3), 282–290. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i3.28912>
- Latujtaba, A., & Nugraheni, L. (2025). Representasi kepemimpinan Ratu Kalinyamat dalam narasi “Ratu Kalinyamat perempuan perintis antikolonialisme 1549–1579.” *Leksikon: Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, dan Budaya*, 3(1), 18–26. <https://doi.org/10.59632/leksikon.v3i1.426>
- Meilink-Roelofs, M. A. P. (1962). *Asian trade and European influence in the Indonesian Archipelago between 1500 and about 1630*. Martinus Nijhoff.
- Mohanty, C. T. (2003). *Feminism without borders: Decolonizing theory, practicing solidarity*. Duke University Press.
- Nasution, I. F. A., & Himawan, A. H. (2021). Demak as the maritime kingdom on the north coast of Java. *Paramita: Historical Studies Journal*, 31(1), 1–12. <https://doi.org/10.15294/paramita.v31i1.25997>
- Rejeki, S. K. (2019). Peranan Ratu Kalinyamat dalam perkembangan Kota Jepara (1549–1579). *Sosio e-Kons*, 11(2), 174–182. <https://doi.org/10.30998/sosioekons.v11i2.3755>
- Said, N. (2013). Spiritualisme Ratu Kalinyamat: Kontroversi *tapa wuda sinjang rambut* Kanjeng Ratu di Jepara Jawa Tengah. *El Harakah*, 15(2), 105–123. <https://doi.org/10.18860/el.v15i2.2761>
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi sejarah*. Ombak.
- Sofiana, A. (2017). Ratu Kalinyamat penguasa wanita Jepara tahun 1549–1579. *Avatara*, 5(3), 1069–1080.
- Spivak, G. C. (1988). Can the subaltern speak? In C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), *Marxism and the interpretation of culture* (pp. 271–313). University of Illinois Press.
- Sulistyanto, B. (2019). *Ratu Kalinyamat: Sejarah atau mitos?* Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Supriyono, A. (2013). Tinjauan historis Jepara sebagai kerajaan maritim dan kota pelabuhan. *Paramita: Historical Studies Journal*, 23(1), 27–39. <https://doi.org/10.15294/paramita.v23i1.2494>
- Wati, L. R., & Lestari, P. (2023). Nilai-nilai kearifan lokal dalam tradisi Baratan Ratu Kalinyamat pada masyarakat Kabupaten Jepara. *Journal of Indonesian Social Studies Education*, 1(2), 134–140.
- Yuval-Davis, N. (1997). *Gender and nation*. SAGE Publications.